

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mengamanatkan bahwa negara berusaha untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini membuktikan bahwa sejak awal berdirinya negara kita Indonesia tercinta ini, pendidikan menjadi pilar utama dalam membangun bangsa mengisi kemerdekaan. Sebagai implementasi pernyataan tersebut pembangunan nasional di bidang pendidikan mendasarkan pada isi UUD 1945 Pasal 31 ayat (3): "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang."

Selanjutnya Undang-Undang NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 (tiga) menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan (UU Sisdiknas, 2011: 2). Dalam hal ini pembaharuan manajemen pendidikan menjadi isu sentral ketika menyoal masalah peningkatan mutu pendidikan nasional.

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran. Lebih lanjut Undang-Undang Sisdiknas pasal 1 ayat 20 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pendidikan dapat berjalan dengan baik apabila dilaksanakan dengan manajemen yang yang baik pula. Menurut Mulyasa (2011:7), manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan kelompok tersebut mencakup perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengawasan (*controlling*) sebagai suatu proses untuk menjadikan visi menjadi aksi.

Manajemen pendidikan merupakan suatu sistem pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan, seperti tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, kurikulum, dana (keuangan), sarana dan prasarana

pendidikan, serta tatalaksana dan lingkungan pendidikan. Nawawi (1989) dalam Mulyasa (2011:7) mengelompokkan garapan manajemen pendidikan ke dalam dua bidang, yakni manajemen administratif dan operasional. Bidang manajemen administratif memfokuskan pada kegiatan perencanaan, organisasi, bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan, serta komunikasi. Sedangkan bidang manajemen operasional memfokuskan pada kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan hubungan sekolah dengan masyarakat.

Akan tetapi manajemen pendidikan dewasa ini sudah tidak memadai lagi untuk menangani berbagai perubahan dan perkembangan yang ada. Paradigma yang dituntut adalah yang mampu memberikan kewenangan luas kepada sekolah dalam mengembangkan berbagai potensinya guna mencapai terwujudnya visi, misi, dan tujuan sekolah maupun tujuan pendidikan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut guru memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 1 menegaskan: "guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah."

Pernyataan yang hampir sama disebutkan di dalam UU Sisdiknas pasal 39 ayat 2: "bahwa pendidik (dalam hal ini guru) merupakan tenaga profesional

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pengabdian dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pada pendidik perguruan tinggi. Maka PPRI No. 19 tahun 2003 pasal 28 ayat 3 mensyaratkan bahwa guru profesional harus memenuhi empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi paedagogik, (3) kompetensi sosial, (4) dan kompetensi profesional.

Dalam mewujudkan guru yang profesional tersebut kepala sekolah memegang peran kunci. Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah menyebutkan bahwa kepala sekolah selayaknya mempunyai lima dimensi kompetensi yaitu: (1) kepribadian, (2) sosial, (3) manajerial, (4) kewirausahaan, (5) supervisi.

Akan tetapi manajemen pendidikan dewasa ini sudah tidak memadai lagi untuk menangani berbagai perubahan dan perkembangan pendidikan. Kondisi tersebut menuntut paradigma baru manajemen pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Adapun paradigma baru tersebut adalah paradigma pendidikan yang memberikan kewenangan yang luas kepada sekolah dalam mengembangkan berbagai potensinya guna mencapai terwujudnya visi, misi, dan tujuan sekolah maupun tujuan pendidikan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut guru memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai

tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejak zaman masih berperadaban tradisional sampai zaman teknologi modern peran guru dalam proses pendidikan belum dapat tergantikan oleh apa pun. Tidak berlebihan apabila guru yang diharapkan bukan hanya sekedar jabatan saja melainkan seorang guru yang profesional.

Guru yang profesional diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa masa depan masyarakat, bangsa dan negara sebagian besar ditentukan oleh guru. Agar tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka mutlak diberikan bimbingan, arahan agar dalam melaksanakan proses pembelajaran lebih bermutu yang akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan kunci utamanya adalah efektivitas proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan berjalan secara aktif jika tersedia sarana dan prasarana yang memadahi dan yang paling utama dipimpin oleh seorang guru yang profesional. Karena hanya guru yang profesional yang dapat memahami kewajiban maupun kompetensi yang diharapkan sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas. Akan tetapi kenyataan di lapangan belum seperti yang diharapkan dalam rumusan yang ideal seperti beberapa

pernyataan di atas. Di semua jenjang pendidikan, SD sampai dengan SLTA, utamanya di jenjang SMP dan SMA/SMK yang peneliti ketahui secara pasti, lebih dari 50% dari seluruh guuru belum mampu memenuhi kompetensi guru profesional. Indikasinya antara lain: (1) Rendahnya pencapaian nilai try out maupun ujian nasional, (2) lamban dalam menyusun perangkat pembelajaran (terutama RPP) dan banyak yang tidak orisinil serta tidak *uptodate*, (3) guru enggan di supervisi karena ada kelemahan yang berusaha ditutupi, (4) sebagian besar guru bahkan termasuk yang sudah bersertifikat pendidik profesional (sertifikasi) dan menerima TPP enggan melakukan pengembangan diri seperti menempuh pendidikan S-2 misalnya, (6) guru belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan jam kerja, dengan fakta masih selalu menuntut libur kelas (*prei kelas*) dalam setiap minggu, (7) masih adanya guru yang mengajar tidak sesuai bidang tugasnya atau tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Di samping indikasi tersebut seorang guru dimungkinkan memiliki kompetensi dan dedikasi yang kurang dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Padahal sesuai dengan paradigma baru guru dikelas juga berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Atas pertimbangan ini berarti tanggung jawab guru di kelas semakin besar dan semakin strategis. Guru harus menyadari betul bahwa tugas dan tanggung jawabnya di kelas yaitu melakukan pengelolaan pembelajaran dan menciptakan situasi pembelajaran yang berkualitas.

Maka dari itu agar pembelajaran yang berkualitas tersebut tetap terjaga keberlanjutannya, selain guru sendiri harus selalu konsekuen dan konsisten dengan perannya, diperlukan adanya supervisi oleh pimpinan. Hal ini sangat perlu dilakukan karena faktor yang menjadi penyebab tidak maksimalnya guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut antara lain kurang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari kepala sekolah atau pihak yang berkompeten lainnya. Adapun cara maupun solusi yang paling strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pemberian bantuan dan pembinaan yaitu melalui supervisi akademik.

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran (Daresh, 1989, Glickman, 2007 dalam Kemendiknas 2011:5). Pendapat senada diungkapkan oleh Sagala (2010: 89) supervisi adalah: pemberian bantuan bagi guru guna memperbaiki situasi belajar mengajar dan meningkatkan kualitas mengajar untuk membantu peserta didik agar lebih baik dalam mengajar. Adapun yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan supervisi akademik atau sebagai supervisor adalah pengawas, pejabat lain yang berkompeten, dan kepala sekolah. Dari beberapa pihak yang mempunyai kapasitas sebagai supervisor tersebut yang paling berkompeten adalah figur kepala sekolah, karena kepala sekolah merupakan pimpinan lembaga sekaligus sebagai pembina dan atasan langsung para guru di sekolah masing-masing.

Kepala sekolah selaku supervisor memiliki kewajiban dan tanggung jawab terlaksananya pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Kegiatan yang relevan dengan tujuan tersebut adalah dengan melakukan salah satu tugasnya yaitu supervisi akademik. Supervisi akademik akan berarti jika dilakukan secara terencana, terprogram dan berkesinambungan.

Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah menegaskan bahwa kepala sekolah selayaknya mempunyai lima dimensi kompetensi yaitu: kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Mulyasa (2006) dalam (Slamet 2011:70) yang menyatakan bahwa “Kepala sekolah adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap proses pendidikan. Karena sesungguhnya supervisor yang utama di sekolah adalah kepala sekolah.” Namun demikian Sagala (2011: 94) mensyaratkan bahwa kepala sekolah _selain pengawas_ selaku pejabat yang secara resmi ditugaskan oleh pemerintah sebagai supervisor harus betul-betul mengerti bantuan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh guru dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas profesionalnya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tetapi ironisnya berdasarkan data Kemendiknas tahun 2010 sebanyak 70% dari 250 ribu kepala sekolah di Indonesia masih enggan menjalankan perannya sebagai supervisor (*Media* 2011:78-79). Peneliti meyakini bahwa bendapat tersebut benar. Karena sumber data lain juga menguatkan, yaitu di dalam majalah bulanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur “*Media*” rubrik opini pembaca edisi Oktober 2011 dalam topik “*Supervisi Kepala Sekolah*”. Ada delapan guru yang artikelnya dimuat dalam majalah edisi tersebut, adapun delapan guru itu berasal dari lima kabupaten di Jawa Timur. Pertama, Slamet Guru SMAN 1 Plosoklaten-Kediri menyatakan bahwa supervisi yang dilakukukan kepala sekolah selama ini hanya formalitas saja.

Padahal menurut Slamet, jika supervisi dilaksanakan sekedar formalitas, tidak dilandasi kejujuran, justru akan menjadi petaka mutu pendidikan (p. 70-72). Kedua, Panca Hutama, S.Pd. Guru SMPN 2 Plaosan Kabupaten Magetan, memaparkan:

“Selama ini supervisi yang dilakukan kepala sekolah lebih bersifat formalitas untuk menggugurkan tugasnya, yaitu hanya dengan wawancara atau sekedar mengumpulkan administrasi dan observasi cukup diserahkan pada guru senior. ... Mungkin juga kepala sekolah merasa kasihan terhadap guru yang mudah depresi bila diobservasi sehingga supervisi cukup administrasi pembelajaran yang dinilai (p.73).”

Ketiga, Anton Timur, M.Pd. Guru SMPN 11 Kota Pasuruan, dengan lantang ia mengatakan bahwa kepala sekolah tidak sungguh-sungguh dalam melakukan supervisi. Kepala sekolah waktunya banyak tersita untuk urusan administrasi, kepala sekolah enggan melakukan kegiatan yang menjadi tujuan supervisi. Keempat, Panji, S.Pd. M.Pd. Guru SMPN 1 Giri Kabupaten Banyuwangi, menjelaskan bahwa kepala sekolah jika menghadapi tugas dan fungsinya sebagai penyelia (supervisor) tidak mau / enggan melaksanakan dan selalu banyak alasan. Kemudian panji menyebutkan beberapa penyebab mengapa kepala sekolah enggan melakukan supervisi.

Penulis kelima adalah Saiful Khoderi, S.Pd. Guru SMPN 2 Gambiran-Banyuwangi, menyebutkan tiga faktor yang menyebabkan guru enggan melaksanakan perannya sebagai supervisor seperti yang diamanatkan dalam UU RI No. 14 Tahun Tentang Guru dan Dosen. Tiga faktor penyebab tersebut yaitu (a) sikap kepala sekolah yang kurang progresif, kurang kreatif

dan kurang inovatif, serta kurang berani mencari terobosan, (b) tidak mempunyai perencanaan (planing) yang bagus, (c) terlalu terfokus pada peran pemimpin sehingga beranggapan bahwa pembelajaran adalah tugas guru semata. Keenam, Yusuf Ali Putro, S.Pd. S.Pd.I. Kepala SMP PGRI 2 Balungpanggang Kabupaten Gresik. Ali mengkritik cukup pedas, *“Kepala sekolah sekarang tak ubahnya sebagai seorang kontraktor yang tugasnya hanya mencari proyek dan proyek pembangunan. Kepala sekolah lebih senang menyupervisi bangunan daripada menyupervisi guru mengajar”*. Ketujuh, Drs. Joko Purnomo, Guru SMPN 1 Genteng Kabupaten Banyuwangi, sama dengan Saiful menyatakan alasan keengganan kepala sekolah melakukan supervisi. Yaitu (a) kepala sekolah kemungkinan berlatar belakang dari guru yang tidak unggul, (b) posisi kepala sekolah yang berada di antara guru-guru yang dahulu sebagai koleganya, (c) pengawas tidak melakukan supervisi kepada kepala sekolah karena terlalu percaya, (d) guru-guru mempunyai persepsi yang salah terhadap supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Dari tujuh orang guru yang opininya dimuat tersebut sependapat bahwa kepala sekolah rata-rata enggan melaksanakan peran dan fungsinya sebagai supervisor. Fakta ini menguatkan kebenaran data dari Depdiknas bahwa 70% dari 250.000 kepala sekolah di Indonesia enggan melakukan supervisi. Sebab tujuh orang guru dan kepala sekolah tersebut berasal dari lima kabupaten di

Jawa Timur, sehingga sangat mungkin di 33 kabupaten/kota yang lain _ dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur _ kondisinya juga sama.

Selain beberapa hal tersebut penelitian ini dilatarbelakangi karena belum ada penelitian yang sejenis terdahulu yang menggunakan istilah “Supervisi Akademik”. Yang sudah ada diantaranya “Supervisi Kelas, Supervisi Pendidikan, Supervisi Pembelajaran, Supervisi Oleh..... dan sebagainya”. Fokus dan sub fokusnya juga demikian. Belum ada penelitian terdahulu yang mengupas “Karakteristik Manfaat Supervisi Akademik”. Sehingga peneliti merasa perlu menelitinya, sebab sebuah kegiatan yang diprogramkan harus diketahui seberapa jauh memberi manfaat bagi pemangku kepentingan.

Sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi yang buruk dalam dunia pendidikan di Indonesia tersebut Kementerian Pendidikan Nasional melalui Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan pada tahun 2011 di Jawa Timur dilaksanakan Diklat Penguatan Kemampuan Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Malang. Dalam kegiatan ini peneliti ikut aktif sebagai peserta pola 300 jam pada angkatan ketiga berlangsung di Hotel Merah Sarangan Kabupaten Magetan Jawa Timur. Pada pelatihan penguatan kepala sekolah ini sebagai materi utama adalah Supervisi Akademik.

Materi supervisi akademik ini mendapat penekanan yang lebih dari penyelenggara karena mendasarkan pada Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah di mana salah satu dimensi kompetensinya adalah supervisi. Maka materi supervisi akademik mendapat prioritas karena ingin membekali kepala sekolah menjadi lebih profesional, mampu membimbing, menjadi teladan, mampu menggerakkan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas sehingga mencapai tujuan.

Jika Supervisi dilaksanakan dengan baik akan memberikan hasil yang baik pula. Sekolah yang mampu menyelenggarakan supervisi dengan baik akan menjadi sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif memiliki ciri: (1) proses pembelajaran yang baik yang ditunjukkan dengan pencapaian prestasi yang tinggi, (2) proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk ikut serta secara aktif dan adanya evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, (3) adanya keterlibatan masyarakat dalam menunjang misi akademik dan menciptakan iklim masyarakat yang demokratis.

Untuk mengetahui lebih dalam dan membuktikan pentingnya supervisi akademik dalam membantu guru meningkatkan profesionalismenya maupun kualitas pembelajaran di kelas, perlu diadakan penelitian. Mengingat faktor-faktor tersebut di atas, masalah supervisi akademik sangat layak diteliti karena beberapa alasan rasional, yaitu (1) dari dimensi waktu lampau yaitu dari data-data yang telah dikemukakan di muka, baik data dari depdiknas

maupun fakta di lapangan yang ditulis oleh tujuh orang guru/kepala sekolah dari lima kabupaten di Jawa Timur, ini sebagai penyebab belum terwujudnya guru yang profesional, (2) dari demensi waktu masa kini, sudah disosialisasikannya tentang urgensi supervisi akademik kepada kepala-kepala sekolah, termasuk workshop penyusunan program supervisi akademik. Sebagai tindak lanjut pengawas mengevaluasi pelaksanaan supervisi akademik para kepala sekolah dengan disertai bukti dokumen pelaksanaan supervisi akademik, (3) demensi waktu masa depan, tantangan global dunia pendidikan menuntut bukan hanya *output* yang berkualitas tetapi juga *outcome* yang mampu bersaing di era pasar bebas sangat diperlukan guru-guru yang profesional dalam menjalankan tugas mengajarnya. Adapun guru yang profesional dapat upayakan melalui pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah sebagai supervisor.

Suatu penelitian akan dapat bermakna jika penelitian itu bermanfaat bagi pembaca dan bagi peneliti itu sendiri. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi bermaknanya suatu penelitian adalah karena diperolehnya data yang akurat atau diperolehnya informasi yang mendalam tentang suatu objek penelitian. Data yang baik dan informasi yang mendalam akan diperoleh jika ada hubungan yang baik antara peneliti dengan informan. Bahkan dalam penelitian sosial yang menyangkut rahasia, seorang peneliti harus menentukan fokus penelitian dan melakukan kerja lapangan pada suatu lokasi penelitian.

Fokus penelitian ini adalah menemukan bagaimana karakteristik supervisi akademik di SMP Negeri 4 Pacitan Kabupaten Pacitan. Fokus penelitian ini dapat diuraikan dalam subfokus yaitu: a) bagaimana karakteristik persiapannya, b) bagaimana karakteristik pelaksanaannya, c) bagaimana karakteristik manfaat dari pelaksanaan supervisi akademik di SMP Negeri 4 Pacitan.

Lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan kerangka teoritis, selain itu juga dilandasi oleh teknis operasional. Oleh karena itu lokasi penelitian didasarkan kemungkinan dapat dan tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Selain itu juga perlu dipertimbangkan segi geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga. Moleong (2006: 128) menyarankan bahwa cara terbaik menentukan lokasi penelitian adalah yang dapat dijangkau dengan mudah, cepat, dengan biaya yang murah dan yang lebih penting harus diyakini terdapat sumber data yang diharapkan dalam fokus penelitian dan relevan dengan judul penelitian. Atas dasar pertimbangan tersebut maka dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di SMP Negeri 4 Pacitan guna melakukan penelitian yang mendalam tentang "Pengelolaan Supervisi Akademik di SMP Negeri 4 Pacitan".

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas SMP Negeri 4 Pacitan dipilih peneliti sebagai setting penelitian karena dilandasi berbagai pertimbangan diantaranya: (1) peneliti memiliki keyakinan bahwa di sekolah tersebut terdapat data baik berupa dokumen maupun informan yang sangat

diperlukan dalam penelitian. (2) Guna mendapatkan informasi yang mendalam sebagai bahan penelitian ini sangat mungkin, karena peneliti memiliki hubungan yang baik dengan narasumber, baik kepala sekolah maupun sebagian besar guru di sekolah tersebut sehingga akan mempermudah menggali data yang diperlukan. (3) Dari segi kebermanfaatannya pun peneliti percaya dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki korelasi dan relevansi dengan judul.

Alasan yang lain mengapa peneliti memilih SMP Negeri 4 Pacitan sebagai lokasi penelitian, padahal di wilayah kecamatan kota masih ada empat SMP yang lain yaitu SMPN 1 Pacitan, SMPN 2 Pacitan, SMP 3 Pacitan, dan SMPN 5 Pacitan. Pertama, dari segi lokasi SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 3 terlalu dekat dengan domisili peneliti. Masing-masing berjarak sekitar 200 s.d. 300 m dari rumah peneliti. Jarak tersebut jika ditempuh berjalan kaki kira-kira lima menit sampai tempat. Kondisi seperti ini peneliti khawatir mengurangi objektivitas peneliti dalam menggali data. SMP 5 merupakan SMP satu atap sehingga tidak masuk kriteria kelayakan.

Kedua, dari segi manajemen dan prestasi sekolah; SMPN 1 Pacitan merupakan satu-satunya SMP Negeri yang berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), sehingga peneliti menganalisis dan membuat hipotesa bahwa sekolah tersebut sudah bagus dalam segala hal termasuk implementasi program supervisi akademik. Penulis khawatir kesan umum yang sudah diyakini peneliti akan mempengaruhi proses penelitian

selanjutnya. Sedangkan SMPN 2 dan SMPN 3 Pacitan tidak menarik bagi peneliti, karena kedua sekolah tersebut tidak memiliki keunggulan maupun keunikan dalam bidang tertentu.

Penelitian ini dapat disebut studi situs SMP Negeri 4 Pacitan, karena memang hanya meneliti implementasi program supervisi akademik di satu sekolah, tidak membandingkan dengan kegiatan di beberapa sekolah. Alasan pertama, penelitian ini tidak peneliti arahkan sebagai penelitian perbandingan ataupun korelasi, karena model penelitian seperti ini sudah jenuh atau sudah terlalu banyak ditulis oleh peneliti terdahulu. Kedua, dengan meneliti banyak sekolah penelitian tidak dapat intensif dan mendalam. Dengan meneliti satu sekolah peneliti berharap dapat lebih intensif dan mendalam.

Relevan dengan fungsi-fungsi manajemen sekolah, supervisi akademik sangat membantu tercapainya manajemen sekolah yang efektif. Unsur-unsur manajemen seperti perencanaan (*planing*), pengelolaan (*organizing*), dan evaluasi (*controlling*) semuanya diterapkan dalam supervisi akademik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dan memperhatikan fokus penelitian yang berusaha menemukan bagaimana karakteristik supervisi akademik di SMP Negeri 4 Pacitan, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah karakteristik persiapan supervisi akademik di SMP Negeri 4 Pacitan?
2. Bagaimanakah karakteristik pelaksanaan supervisi akademik di SMP Negeri 4 Pacitan?
3. Bagaimanakah karakteristik manfaat supervisi akademik di SMP Negeri 4 Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik persiapan supervisi akademik di SMP Negeri 4 Pacitan.
2. Untuk mendeskripsikan karakteristik pelaksanaan supervisi akademik di SMP Negeri 4 Pacitan.
3. Untuk mendeskripsikan karakteristik manfaat supervisi akademik di SMP Negeri 4 Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, dan berbagai pihak khususnya yang berkepentingan dengan implementasi program supervisi akademik

untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam menunjang profesionalisme guru, selain itu juga kepala sekolah sebagai supervisor.

b. Dapat dijadikan bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut serta dalam merumuskan teori.

2. Secara Praktis

a. Bagi guru, dengan dilaksanakannya supervisi akademik oleh kepala sekolah, mendapatkan masukan dan koreksi untuk introspeksi dan membangun motivasi dalam meningkatkan kompetesinya sehingga menjadi guru yang benar-benar profesional.

b. Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian dapat dipakai sebagai masukan untuk dapat membimbing, mendorong, memberi bantuan, dan meningkatkan kinerja semua guru.

c. Bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk mengambil keputusan dan menentukan arah kebijakan (*policy*) pendidikan utamanya dalam meningkatkan profesionalisme guru dan kepala sekolah.

E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; atau proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

2. Supervisi adalah serangkaian upaya pemberian bantuan kepada guru dalam bentuk layanan profesional yang diberikan oleh supervisor (kepala sekolah, penilik sekolah, dan pembina lainnya) guna meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar.
3. Akademik disamakan dengan akademis, berarti bersifat ilmiah, bersifat ilmu pengetahuan, berhubungan dengan akademi atau lembaga pendidikan.
4. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
5. Supervisor adalah orang atau pihak yang melakukan kegiatan supervisi akademik, misalnya kepala sekolah, pengawas sekolah dan lain-lain.
6. kompetensi adalah kemampuan menguasai sesuatu hal, misanya
 - a. Kompetensi siswa, adalah kemampuan untuk menguasai materi pembelajaran sesuai dengan standar atau ketentuan yang ditetapkan.
 - b. Kompetensi guru, yaitu kemampuan untuk menguasai ilmu maupun keterampilan sesuai dengan standar atau ketentuan yang ditetapkan.
 - c. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam mendidik atau melakukan pembelajaran kepada anak didik (siswa).
7. karakteristik adalah ciri khas, ciri-ciri yang mencerminkan sifat dasar, sifat esensial seseorang atau suatu hal.

8. Profesionalisme artinya bersangkutan dengan profesi, atau memerlukan keahlian khusus untuk melakukannya. Dalam konteks ini sering dikaitkan dengan profesionalisme. Sedangkan profesionalisme berarti mutu, kualitas, dan tindak-tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.
9. Manajemen artinya proses mencapai hasil dengan atau melalui orang lain dengan memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia.
10. Manajemen pendidikan adalah proses atau kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan berbagai bidang dan komponen pendidikan.
11. Data, menurut Utama (2010) data dibedakan dalam dua pengertian:
 - a. data sebagai informasi faktual yang dipakai dasar untuk penalaran, diskusi, atau penghitungan misalnya dalam penelitian ilmiah.
 - b. data sebagai kenyataan-kenyataan murni yang belum diberi penafsiran apapun, belum diubah atau belum dimanipulasi, namun telah disusun dalam sistematika statistika tertentu.
12. Data kualitatif adalah data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar.
13. Data kuantitatif adalah data yang hadir dalam bentuk angka.
14. Sumber data adalah sesuatu, tempat, pusat data bisa diperoleh atau dikumpulkan. Sumber data menurut Lofland dan Lofland (1984:47) dalam

Moleong (1997) data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.

15. Kegiatan pembelajaran adalah proses terjadinya interaksi antara guru dengan siswa untuk memberi dan menerima materi pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
16. Instrumen supervisi adalah alat pengumpul data yang dipakai oleh supervisor pada saat melaksanakan supervisi akademik.
17. Fokus penelitian adalah masalah-masalah atau hal-hal esensial atau penting mendesak, urgen, untuk diteliti atau dicari pemecahan masalahnya.
18. Tujuan pembelajaran adalah sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan pembelajaran yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
19. Tujuan pendidikan adalah sasaran-sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan-kegiatan pendidikan.